

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF PADA
DRIVER GRAB INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Achmad Fathoni Al Chudri

NIM : C03215004



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program studi Hukum Pidana Islam
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Fathoni Al Chudri
NIM : C03215004
Semester : VIII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Hukum Terhadap Order Fiktif Pada *Driver Grab* Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Achmad Fathoni Al Chudri

NIM. C03215035

1
2
3
4

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni Al Chudri NIM.C03215004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.ag., M.H
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Fathoni Al Chudri NIM.C03215004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 02 Agustus 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fathoni Al Chudri
NIM : C03215004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : fathonychudri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF
PADA DRIVER GRAB INDONESIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis


(Achmad Fathoni Al Chudri)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia. (2) bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum tentang tindak pidana order fiktif *driver Grab* Indonesia.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang sumber data nya diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deksriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Dengan menggunakan 2 ponsel atau lebih dengan dua aplikasi didalamnya. Order fiktif juga sebagai suatu tindak kejahatan *cyber*(*cybercrime*) yaitu bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui dunia internet. Kejahatan siber masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* sebab pada zaman Rasulullah SAW belum ditemukan teknologi internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Maka tidak ada satu ayat ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif. Dalam hukum pidana Islam order fiktif yang dilakukan *driver Grab* dapat dikatakan perbuatan penipuan. Menurut Islam, penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain siapapun yang berdusta maka ia akan menempati tempat yaitu di dalam neraka. Menurut hukum pidana Islam sanksi tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk *jarīmah* dalam *ta'zīr*, maka hukuman bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh hakim atau *ulil amri* (pemerintah). Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur kejahatan order fiktif, yaitu sanksinya penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih memperdalam pengetahuan dalam perkembangan teknologi untuk menyesuaikan perkembangan hukum zaman sekarang, banyaknya kejahatan melalui internet perlu adanya pengetahuan lebih mengenai teknologi dan membuat Undang-Undang baru mengatur tentang transportasi *online* yang bisa dijalankan secara maksimal mengingat banyaknya *driver online* agar meminimalisir kejahatan oknum *driver online*.

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di dunia mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.² Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti

² Mueljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ketahun.³

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah bersifat global, terutama dengan berkembangnya internet, globalisasi yang timbul sudah dari aspek kehidupan, baik di bidang sosial, iptek, kebudayaan, dan ekonomi.

Perkembangan teknologi memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap pengguna atau pengaksesnya berupa dampak negatif dan positif, salah satu dampak negatifnya yaitu sebagai sarana *cybercrime* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet maupun yang lain seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, dan manipulasi. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali tindak penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

³ Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bogor; Poletia, 1985), 45.

Adanya aplikasi *Grab* sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi *Grab* terdapat berbagai layanan, meliputi *GrabTaxi*, *GrabCar*, *GrabShare*, *GrabBike*, *GrabFood*, *GrabExpress*, dan *Rent*.⁴ Merambahnya bisnis ojek berbasis *online Grab* yang sangat menjanjikan membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi atau hanya melakukannya sebagai pekerjaan sampingan sebagai pengendara ojek untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan transportasi dengan sentuhan teknologi mengubah modal usaha menjadi minim namun efektif. Saat ini, berkat sentuhan teknologi membuat kepastian mendapatkan kendaraan umum menjadi lebih jelas dari segi ketersediaan, waktu, dan harga sesuai dengan keinginan masyarakat yang terakomodir akibat keluhan atau kesulitan masyarakat mendapatkan kendaraan umum.

Perlu dipahami bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi

[illegible]

Insentif berupa bonus demi mendorong produktivitas sopir ojek *online* ternyata berujung pada aksi kecurangan demi mendongkrak performa agar mendapatkan bonus belakangan kian marak di kalangan sopir ojek online.⁵ tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang dengan membuat orderan palsu atau melakukan order fiktif.

Perbuatan order fiktif di dalam transportasi *online* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama *driver* maupun perusahaan.

Order fiktif akan ditindak lanjuti dan diserahkan pihak berwajib maupun kepolisian apabila angka yang dirugikan sangat besar. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, Perusahaan hanya akan mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan PT. *Grab* Indonesia. Tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* ini sangat mirip

[illegible]

dengan unsur-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP. Bedanya ialah order fiktifnya bisa dilakukan oleh *driver online*, dan dilakukan secara *online*.

Tindak pidana order fiktif yang dilakukan *driver Grab* juga harus menggunakan *e-mail* terlebih dahulu untuk membuat akun baru untuk melakukan perbuatannya. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi *Grab*, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak.

Menurut pasal 378 KUHP :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."⁶

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan termasuk dalam hal ini tindak pidana order fiktif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana order

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 161.

biasanya pelaku order fiktif ini juga membuat *email* terlebih dahulu.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Hakim banyak menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana Order Fiktif dengan pasal diatas. Dengan menggunakan Asas *lex specialis derogat legi generalis*. Yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi pada tindak pidana *online* adalah pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana.⁷ Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut.

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 62.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁹

Islam mengharamkan segala bentuk macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penipuan ataupun order fiktif ini. Dalam tindak pidana order fiktif ini cenderung melakukan pembohongan, adapun bohong itu sama dengan dusta. Allah berfirman pada surat *An- Nahl* ayat 105 :

Artinya:”Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”¹⁰

Dusta adalah bohong, hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dan merugikan orang lain.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

- ### C. Rumusan Masalah

- #### D. Kajian Pustaka

¹³Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

¹⁵Chandra Imelda Noer, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terkait Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Pt.Gojek Indonesia” (Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, 2017).

Letak perbedaan pembahas skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi deskriptif tindak pidana Order Fiktif *Driver Grab* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang *Driver Online* yang dinaungi Perseroan Terbatas

¹⁶ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen *GO-Food* di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk 2 (dua) aspek:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Order Fiktif pada *Driver Grab* dan bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang

[illegible]

berkaitan dengan tindak pidana Order Fiktif pada *Driver Grab* maupun *Driver Online* lainnya.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus tindak pidana order fiktif *driver grab* Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, agar para pembaca mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu memaparkan istilah kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih *jināyah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama khususnya tentang *ta'zīr*.¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitiandikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode relevan terhadap permasalahan tertentu.²⁰

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tindak pidana order fiktif maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian tindak pidana ini menekankan pentingnya pemahaman situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Jadi, lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual adalah titik berangkat penelitian tersebut bukannya asumsi,

²⁰Joko Subagyo, *Metode Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 1-2

resmi. Sumber data yang penyusun peroleh dari tingkat kepuasan konsumen, informasi di tempat kejadian perkara dan analisis dari hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.²⁴

- a. Observasi yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.²⁵Peneliti mengadakan observasi lapangan dengan melihat kondisi lapangan dan melihat peluang menemukan *driver online*.
- b. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancara.²⁶ Peneliti mengadakan wawancara dan Tanya jawab secara langsung dengan 3 *driver*, mantan pelaku order fiktif dan 2 karyawan PT. *Grab* Indonesia di Surabaya untuk mengetahui apa benar pernah ada Order Fiktif yang dilakukan *driver*.

²⁴ Yuni Sare, *Antropologi SMA MA XII*. (Jakarta : Grasindo, 2006). 117.

²⁵Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT Bumi Aksara : Jakarta.2008), 56.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), 230.

- c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap praktik Order Fiktif pada *Driver Online Grab* Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode deskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain.²⁹ Kasus yang diteliti yaitu tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia yang secara keseluruhan kemudian dianalisa dengan hukum pidana Islam.

Deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

²⁹ Noeng Muhjair, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori *jarīmah ta'zīr* yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur, dan sanksi hukumannya.

Bab ketiga membahas tentang tindak pidana order fiktif pada *driver grab* Indonesia, meliputi profil *Grab* dengan subbab-sejarah, layanan, pengertian, bentuk dan unsur pidana order fiktif, cara melakukan order fiktif, dan akibat dari order fiktif.

Bab keempat menganalisis lebih mendalam terhadap tinjauan hukum pidana Islam terhadap order fiktif pada *driver Grab* Indonesiadan sanksi terhadap tindak pidana order fiktif pada *driver Grab* Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta saran.

BAB II

JARIMAH TA'ZIR DAN PENIPUAN DALAM ISLAM

A. *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *Ta'zīr* menurut bahasa adalah *ta'dīb* atau memberi pelajaran.¹ Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pelajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥadd*.² Penjelasan ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syariat karena ia sudah menyebut istilah *ḥadd*. Dalam fiqh *jināyah*, *ta'zīr* merupakan bentuk dari *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berkembang dan berubah.

Menurut Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zīr fī Syari'ah Al-Islamiyyah* *Ta'zīr* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi had dan kafarat. *Ta'zīr* sama dengan *hudūd* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajar (untuk

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

² M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jināyah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136

Dari kesimpulan diatas, penyusun menyimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hadd* dan *qisās*.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* ini untuk kemaslahatan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah. Kemudian melepaskannya Analisis terhadap tindakan Rasulullah adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah membolehkan

⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdad Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al Fikr), 236.

penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.⁵

Dalam fiqh *jināyah*, *ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah* yang sanksi hukumnya ditentukan *ulil amri* maupun hakim. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukumnya pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain.

Oleh karena itu *jarīmah ta'zīr* sering disebut dengan *jarīmah* kemaslahatan umum. Dalam menangani masalah *jarīmah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi kepada pembuat *jarīmah*, sesuai dengan jenis *jarīmah* dan keadaan pelakunya.⁶

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum *ta'zīr* seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”.(QS. Al-Fath (48):9).

Yang dimaksud dari kata ‘*Tu’azziruuhu*’ dalam ayat diatas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta’zīr* dalam bahasa arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan ‘*Azzara Fulanun Fulaanan*’ yang

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 251.

⁶M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqh Jināyah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 140-141

artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi member peringatan dan pelajaran kepada atas dosa yang telah dilakukan olehnya.⁷

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* juga terdapat dalam beberapa hadist Rasulullah SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ بَهْرَابِنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya :“Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.(Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’I, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh hakim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُوا ذَوِيَاهُمَا عَشْرَتَهُمَا إِلَّا
الْحُدُودَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

Artinya : Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Ringankan hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarīmah - jarīmah ḥudūd*.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nisa’I, dan al-Baihaqi)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali,

⁷ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Juz 10*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif,).159.

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang adanya *ta'zīr* dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya:⁸

- 1) Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan tindak pidana.
- 2) Hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.
- 3) Hadis ketiga menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan dengan cambukan hukuman *ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*.

Dilihat dari berbagai hal *jarīmah ta'zīr* terdiri dari berbagai macam, yaitu sebagai berikut:⁹

- ⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

- ¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14.

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan Individu.
- 4) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan keamanan umum.
- 5) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlak dan kehormatan.
- 6) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan pembunuhan.

Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus, Unsur umum yaitu unsur yang dianggap sebagai tindak pidana pada semua *jarīmah* , sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur umum untuk *jarīmah* yaitu:¹¹

Unsur formal adalah adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah*. *Jarīmah* tidak akan terjadi sebelum

[illegible]

2) Unsur Material

3) Unsur Moral

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari *Raddul Muhtar* memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zīr* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir¹²

Hukuman *ta'zīr* secara garis besar dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

a. Hukuman Mati

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi untuk *jarīmah ta'zīr*, dan hanya dilaksanakan dalam *jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat sebagai berikut:¹⁴

¹³ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muḥadd zdzab*, (Kairo: Dar Al-Hadists, 2010), jilid 2, 268.

[illegible]

- b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebarkan dimuka bumi.

Hukuman cambuk (*jilid*) merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ḥudūd dan *ta'zīr*. hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Jumlah cambukan dalam *jarīmah ḥudūd zina ghairu muḥshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan.

¹⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 100.

- Selanjutnya, berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam *jarīmah ta'zīr* yaitu sebagai berikut:¹⁸
- Menurut Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada *ijtihadd* hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.
 - Menurut Ulama Hanafiyah, batas minimal dalam *jarīmah ta'zīr* harus member dampak preventif dan repressif.
 - Menurut mayoritas ulama, menyatakan batas terendah yaitu satu kali cambukan.

Dalam sanksi ini ada dua hukuman, yaitu hukuman pengasingan dan hukuman penjara. Berikut ini penjelasannya.

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-Habsu* yang berarti *al-man'u* yang artinya pencegahan atau

¹⁸ Ibid., 114

Alasan diperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Zharbi' ibn al-Harits salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati di dalam penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Makkah ketika ia menolak untuk membaiat Ali.

a) Hukuman Penjara Terbatas

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 101

Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara ditentukan batasnya, sama dengan *hadd* dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *hadd* dan ta'zir.

Dari uraian diatas, dijelaskan bahwa tidak ada batas yang pasti dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sesuai *ta'zīr* dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan kondisi *jarīmah* ,pelaku, waktu, tempat dan situasi ketika *jarīmah* itu dilakukan.

Istilah lain dari hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam di berlakukan kepada pelaku jahat yang sangat

²¹ Ibid., 370.

b. Mengubahnya (*al-Taghyir*).

c. Menghancurkannya (*al-Ithlaf*),

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim membagi hukuman ini menjadi dua, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan tidak dipastikan kesempurnaannya. berikut ini penjelasannya:

[illegible]

Selain hukuman *ta'zīr* yang sudah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya. Hukuman *ta'zīr* tersebut adalah:²⁷

a. Peringatan keras

Peringatan keras dapat dilakukan saat diluar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 268.

b. Dihadirkan di hadapan sidang

c. Nasihat

d. Celaan (*Taubikh*)

²⁸Ibid., 269.

(pelajaran) kepada mereka, sekaligus merupakan celaan terhadap mereka.²⁹

e. Pengucilan

Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umaiya, dan Mirarah bin Rubi'ah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa mengajak bicara.³⁰

f. Pemecatan

Pemecatan yaitu melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas yang dipegangnya maupun jabatan sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya tersebut. Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan *jarīmah* atau pelanggaran hukum, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan hal-hal lainnya, seperti pegawai yang melakukan tindakan korupsi.³¹

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman cambuk lalu pelaku diarak keliling kota, sambil mengumumkan kepada masyarakat bahwa pelaku ini adalah seorang saksi palsu.

²⁹ Ibid., 270

³⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jināyah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 78

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 271

dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihaad manusia. Masyarakat berdasarkat kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan dan tempat.

dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia. masyarakat berdasarkat kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan dan tempat.

dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia. masyarakat berdasarkat kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan dan tempat.

1. Sejarah PT. *Grab*

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan berwarga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya

⁴⁰⁴⁰ <https://www.grab.com/id/> diakses 2 April 2019 13.40 Wib

Harvard *Business School's* 2011 *Business Plan*.

Layanan *Grab* ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada 3K yaitu keselamatan, kepastian, dan kecepatan. *Grab* sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.⁴¹

Grab bertransformasi membuat sesuatu yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan tujuan, menjadikan Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih baik. Berikut ini adalah perjalanan *Grab* dari tahun 2012 hingga kini.⁴²

- 1) Pada tahun 2012 *Grab* pertama launching dengan nama *Grab Taxi* pada bulan Juni.
- 2) Pada tahun 2013 *Grab* memasuki Filipina pada Juli 2013 dan Singapura pada Oktober 2013.
- 3) Pada tahun 2014 *Grab* memasuki Vietnam pada Februari 2014, Indonesia pada Juni 2014, *launching* pertama *Grab Car* pada Juli 2014 dan *launching GrabBike* pada November 2014.
- 4) Pada tahun 2015 *Grab* *launching* pertama *GrabExpress* dan *GrabHitch*

⁴¹<https://www.grab.com/id/about/> di akses pada 02 April 2019 14.00 Wib

⁴²<https://www.grab.com/id/about/> diakses pada 02 April 2019 14.00 Wib
<https://www.dream.co.id/dinar/sejarah-grab-dari-tahun-2012-hingga-jadi-deccacorn-1902284.html> diakses 02 April 2019 14.10 Wib

- Berawal dari transportasi online, kini telah menjelma menjadi Super App terkemuka di Asia Tenggara yang menawarkan Everyday SuperApp yang kini melengkapi gaya hidup masyarakat. Grab memiliki filosofi untuk menyatukan para mitra dan membuat kehidupan Asia Tenggara lebih baik.

Grab sebagai decacorn pertama di Asia Tenggara dan aplikasi terdepan menyediakan berbagai layanan sebagai berikut:

GrabTaxi adalah layanan transportasi Taxi yang membantu penumpang menemukan pengemudi taxi terdekat pada aplikasi *grab* dengan jaringan armada taksi terluas yang menawarkan pengalaman berkendara yang paling efisien dan berkendara dengan tarif sesuai argo, tanpa argo tembak.⁴³

[illegible]

Kemudian bonus atau insentif yang diterima oleh *driver grab* tersebut akan ditransfer secara otomatis ke dompet tunai milik masing-masing *driver* dengan ketentuan apabila mitra *driver* mendapatkan penumpang maka dalam setiap perjalanannya saldo yang terdapat dalam *grab pay* dalam akun *driver* akan dipotong 20% oleh pihak *grab*.

Untuk *grabcar* ini sama dengan *grabbike* menggunakan pengumpulan berlian akan tetapi insentifnya lebih besar *grabcar*. Abdul Ilham menjelaskan untuk mengejar bonus ketentuan untuk senin sampai hari jumat untuk transaksi *grab* 10 kali maka *driver* mendapat insentif sebesar Rp. 120.000,- transaksi *grab* 14 kali trip maka *driver* mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000,- transaksi *grab*

[illegible]

B. Pengertian Order Fiktif *Grab*

Order fiktif di definisikan sebagai tindak kejahatan penipuan transportasi *online*. Menurut Rachmad Faizal selaku karyawan lapangan *grab* order fiktif adalah order atau pesanan palsu yang dilakukan oleh *driver grab* dengan menggunakan aplikasi *grab* untuk disalahgunakan yang dapat merugikan perusahaan.⁵²

Menurut Bagus Fajar Triantono selaku *driver grab*, order fiktif adalah booking palsu atau pesanan kosumen dimana ada kejanggalan di dalamnya, yang bersifat tipuan dan merugikan banyak *driver* dengan maksud merusak

⁵² Rachmad Faizal, *Wawancara*, Surabaya, 17 November 2018.

Menurut MW selaku mantan pelaku order fiktif, yang menerbelakangi tindak order fiktif dilakukan karena kebijakan kantor pusat yang terus melakukan penerimaan calon *driver* terus menerus. Akibatnya *driver* terlalu banyak sehingga orderan yang berebutan, ada yang sampai *stay* di mall, terminal, di sekolah dan ditempat banyak orderan pun banyak *driver* yang tidak dapat orderan sama sekali.⁵⁷

MW berpendapat apabila melakukan order fiktif tidak ada yang dirugikan, karena *driver* mencari keuntungan dari insentif atau bonus dari *grab* saja, karena pendapatan dari *Grab* tidak hanya dari pesanan dari konsumen, seperti *download* aplikasi *Grab* di *PlayStore*. meskipun melakukan orderan asli, tetap intensif dan bonus sama.⁵⁸

Menurut Anindya Pradhipta selaku karyawan kantor *grab* Surabaya kebijakan kantor pusat melakukan penerimaan calon *driver* harus dilakukan, karena banyaknya konsumen yang *complain* susah mendapatkan orderan, *driver* banyak yang tidak mau pakai aplikasi *OVO*, banyaknya *driver* baru

⁵⁸ Ibid.

Menurut Achmad Irfan Imannudin selaku *driver* Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berikut ini unsur-unsur order fiktif sebagai berikut.⁶⁰

1. Hanya bisa dilakukan *driver online*.
2. Melawan hukum.
3. Menguntungkan diri sendiri.
4. Melakukan manipulasi,
5. Merugikan perusahaan.

Pelaku melakukan order fiktif dengan 2 bentuk cara yaitu order fiktif menggunakan fitur *fake GPS* dan tidak menggunakan aplikasi tambahan. Berikut ini penjelasannya:

1. Menggunakan *fake GPS* dan Aplikasi Tuyul

⁶⁰ Achmad Irfam Imannudin, *wawancara*, Surabaya, 30 April 2019.

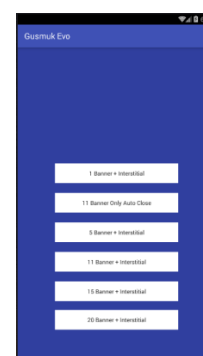
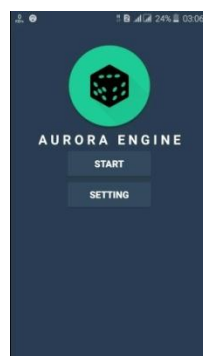
Tindakan kecurangan atau fraud seperti *fake GPS* pada aplikasi ojek online sering dilakukan para pengemudi demi mendapatkan keuntungan. Aplikasi ini para *driver online* menyebutnya dengan aplikasi “tuyul” karena pengemudi *online* seolah-olah mendapatkan penumpang lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek *online* yang curang tersebut hanya diam ditempat.⁶¹ berikut ini gambar *icon* aplikasi *fake GPS*:



Gambar 3.3

Gambar diatas merupakan *screenshot* beberapa *icon fakeGPS* yang ada di *PlayStore*.

Berikut ini gambar aplikasi tuyul dengan menggunakan aplikasi *admob Aurora engine* dan *admob Gusmuk Evo*:



⁶¹<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/04/08433971/begini-cara-taksi-dan-ojek-online-buat-order-fiktif-pakai-tuyul?page=1> 6 Mei 2019, 14.09

Gambar diatas merupakan *screenshot* aplikasi tuyul *Aurora engine* dan *Gusmuk Evo*

Grab membuat program dan memanfaatkan teknologi *machine learning* (pembelajaran mesin) dan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan/AI) untuk mendeteksi aplikasi *fake GPS* dan order fiktif. dalam program ini, *grab* telah berhasil menangkap sindikat dan *driver online* yang telah terbukti melakukan kecurangan di beberapa kota, seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Medan.⁶³

Order fiktif ini sudah lama dilakukan sebelum para oknum menggunakan *fake GPS* dan tuyul. Cara ini dilakukan layaknya order biasa. Akan tetapi membutuhkan ponsel 2 atau lebih untuk

⁶³<https://www.liputan6.com/tekno/read/3686623/upaya-grab-dan-go-jek-atasi-fraud-dari-gps-palsu-hingga-order-fiktif> diakses 8 Mei 2019

melakukannya tanpa perlu menginstal *fake GPS* dan tuyul. Cari tempat yang sangat sepi atau tempat yang jarang dijangkau oleh *driver* lain seperti di sawah, plosok desa, dan tempat sepi orderan.⁶⁴

Oknum melakukan pemesanan menggunakan aplikasi *grab* untuk kostumer. setelah orderan tersebut didapat dengan aplikasi *grab driver*, oknum melakukan perjalanan sesuai destinasi yang tertera di aplikasi tanpa membawa penumpang. Berbeda dengan menggunakan *fake GPS* dan aplikasi tuyul yang hanya diam ditempat. Resiko diketahui oleh *grab* tanpa menggunakan *fake GPS* lebih kecil daripada menggunakannya. Bukan berarti tidak bisa dilacak, meski melakukan order tanpa menggunakan *fake GPS* dan tuyul, menurut Rachmad Faizal sebagai karyawan orderan yang melebihi 4 kali dalam 1 jam sudah bisa dipastikan bahwa pelaku melakukan order fiktif dan melihat rating dari *driver* yang melakukan order fiktif sempurna.⁶⁵

D. Akibat dari Order Fiktif.

Demi mendapatkan insentif atau bonus, sejumlah pengemudi atau *driver* ojek *online* melakukan order fiktif. semakin meningkatnya jumlah pengendara ojek *online*, membuat persaingan antar driver semakin ketat. Alhasil tak sedikit di antara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Akibatnya banyak yang dirugikan, tidak hanya

⁶⁴ MW, *wawancara*, Surabaya, 30 April 2019.

⁶⁵ Rahmad Faizal, *Wawancara*, 17 November 2018.

Segala bentuk Pelanggaran, Mitra akan mendapatkan pemberitahuan peringatan dan sanksi. Apabila Mitra melakukan pelanggaran yang sama, Akun Mitra akan di NON-AKTIFKAN Permanen.

Gambar diatas merupakan *file pdf* kode etik roda 2 dari kantor *grab* Indonesia

“Mencurangi atau memanipulasi sistem *Grab* milik sendiri atau orang lain untuk mendapatkan bonus atau insentif akan dikeluarkan”

“Membuat akun penumpang untuk keperluan pemesanan baik dikerjakan sendiri atau oleh mitra *grab* lain”

[illegible]

1) Tidak dapat menerima orderan lain.

2) Performa *driver*.

3) Tenaga

4. Konsumenten

⁷² Bagus Fajar Triantono, *wawancara*, 29 April 2019

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB pelaku 3 Putra Utama dipanggil oleh pelaku 1 Lukas Hadi Setiawan untuk datang ke rumahnya yang terletak di Patemon Barat 248 Rt. 005 Rw. 014 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, kemudian pelaku 3 diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik *GrabCar* dan kemudian pelaku 3 bersedia melakukannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib para pelaku berangkat dari Surabaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih menuju ke Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan pada saat itu pelaku 3 menyiapkan *handphone* yang akan digunakan untuk melakukan orderan fiktif dengan menggunakan *handphone* secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 trip.⁷⁴ Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan para pelaku menggunakan

⁷⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3ff97e976a0ffd336cbc7c626aa2dd10> diakses 11 Mei 2019, 2

dengan pelaku 1 Lukas Hadi Setiawan ke wilayah Mantup dan
cara yang sama membuat order fiktif dengan menggunakan
penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan
Kemudian Lukas Hadi Setiawan dengan Aditya Putra Utama
kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal
2018 sekitar jam 11.00 Wib para pelaku berangkat menuju ke
Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggo
Lamongan.⁷⁵ Bahwa pelaku Lukas Hadi Setiawan dan Ad
Utama membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan
menggunakan *handphone* secara acak melakukan order *Grab*
sistem *Grab* secara *online* kemudian operator dari pihak *Grab*

dengan pelaku 1 Lukas Hadi Setiawan ke wilayah Mantup dan
cara yang sama membuat order fiktif dengan menggunakan
penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan
Kemudian Lukas Hadi Setiawan dengan Aditya Putra Utama
kembali ke Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal
2018 sekitar jam 11.00 Wib para pelaku berangkat menuju ke
Mantup Kabupaten Lamongan ditangkap oleh Anggo
Lamongan.⁷⁵ Bahwa pelaku Lukas Hadi Setiawan dan Ad
Utama membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan
menggunakan *handphone* secara acak melakukan order *Grab*
sistem *Grab* secara *online* kemudian operator dari pihak *Grab*

[illegible]

4) Untuk HP merk *Himax* dengan akun yang bernama Zainal Fanani tersebut terdapat tanggal 17 Maret 2018 estimasi pembayaran insentif 150k dimana berarti hal tersebut sudah menerima dari pihak *grab* senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah memperoleh 10 trip.

para terdakwa sebanyak 4 akun *driver* yaitu antara lain al Handi, Wahyu Arif Hidayat, Budiansyah Kindangen dan Zai senilai 18.181.480,- (delapan belas juta seratus delapan puluh empat ratus delapan puluh rupiah) yang dihitung dari k transaksi.⁷⁷Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur da pidana Pasal 51 Jo. 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Ta

2. SURYA.co.id SURABAYA – Melakukan order fiktif, 15 *driver* aplikasi *grab* harus dimejahijaukan. Dengan kerugian sebesar 5.000.000 (lima juta) per orang, para *driver* ini didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Para terdakwa *driver* disidang di PN Surabaya secara

⁷⁷ Ibid., 6

Nanda, La Andika MF, Roberto J, Reza AF, Risky RR, Bha
Glarry CM. “Ke-15 terdakwa ini dijerat dengan Pasal 51 A
Pasal 35 UU No 19/ 2016 tentang Informasi dan Transaksi Ele
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” jelas Jaksa Penuntut Umum A
Senin (2/7/2018). Untuk 8 terdakwa yakni M Dikri Albari
menghadirkan dua saksi polisi dari Polrestabes yang menangka
yakni Totok dan Dedi. Keduanya adalah bagian tim yang m
para terdakwa saat mereka ngumpul disebuah warung di
Bhayangkara. “Kami mendapat laporan dari masyarakat, dima
membuat grup *WhatsApp* dan bekerjasama melakukan order fi
Dedi dalam sidang. Ketika menggerebek mereka, polisi m

pelaku terdakwa. Sedangkan untuk 7 terdakwa yakni Rizki Dwi Nanda dkk, saksi yang dihadirkan juga dari polisi dan keterangan tak jauh berbeda dengan proses penangkapan pada M Dikri Albari dkk. Hanya saja, ketika hakim menanyakan kenapa mereka melakukan order fiktif, semuanya kompak membenarkan karena dendam. Itu karena sebelumnya, sebagian besar adalah *driver online* yang tiba-tiba di *suspend* meski tak melanggar kode etik.⁷⁸

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif *Grab* Indonesia

Tidak lepas juga dari tindak kejahatan, Seperti halnya dalam kasus order fiktif, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani secara serius. Order fiktif merupakan orderan palsu yang dibuat oleh *driver online* dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Tindak pidana order fiktif ini memenuhi unsur-unsur penipuan atau pasal 378 KUHP. Bedanya ialah order fiktif hanya bisa dilakukan oleh *driver online*, dan dilakukan secara *online*.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur terpenting dalam pencurian adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak teralisasi apabila tidak dapat diambil dari tempat penyimpanannya.¹ Apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *ḥadd* dalam pencurian, yaitu potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukum *ta'zīr* seperti penipuan.

Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain baik itu uang maupun

[illegible]

Tentang perbuatan tindak pidana penipuan, yang di dalam *Al-Qur'an* tidak diterangkan secara rinci dan jelas, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dhalim, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain dan termasuk mengambil hak orang lain yang tertipu. Ketentuan hukum yang jelas tentang perbuatan penipuan tidak kita jumpai baik dalam *nash* *Al-Qur'an* maupun dalam Hadist, begitu juga tentang akibat terhadap pelanggaran yang disebabkan perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum di dalam *Al-Qur'an* tidak seluruhnya bersifat *tafsili* akan tetapi sebagian bersifat *ijmali*.

Menurut hukum pidana Islam, dapat dikatakan *jarīmah* jika telah memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur *jarīmah* yang bersifat umum maupun khusus. Adapun unsur dalam perbuatan order fiktif adalah:

³ Yusuf Qaradhwawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), 266.

Order fiktif merupakan tindak pidana atau *jarīmah* bila dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan order fiktif tidak ada nas yang menjelaskan secara detail baik dari Al-Qur'an maupun Hadist, akan tetapi unsur-unsur order fiktif juga memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traansaksi Elektronik.

Order fiktif jika ditinjau segi dasar hukum (penetapannya), maka kejahatan ini masuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, karena order fiktif merupakan kejahatan dalam bentuk penipuan melalui dunia internet yang tidak akan lepas dari hukuman, sehingga penetapan hukuman kejahatan order fiktif sepenuhnya diserahkan oleh hakim atau *ulil amri*.

[illegible]

ataupun hadist yang menyebutkan secara jelas mengenai eksistensi kejahatan *cyber* seperti kasus order fiktif.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Order Fiktif *Driver Grab* Indonesia

Order fiktif akan ditindaklanjuti dan diserahkan kepada pihak kepolisian apabila yang dirugikan sangat besar secara finansial. Akan tetapi bila yang dirugikan tidak besar, perusahaan *grab* hanya akan memutus mitra atau mengeluarkan pelaku tersebut, sesuai dengan kode etik yang sudah dibuat oleh perusahaan.⁴ Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana order fiktif, yaitu Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isinya sebagai berikut:

Pasal 35 menjelaskan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik”

Pasal 51 ayat (1):

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan

Pasal 378 KUHP, mengharuskan pihak penegak hukum untuk

⁴Rachmad Faizal, *wawancara*, 17 November 2018.

Tujuan dari *ta'zīr* atau sanksi *ta'zīr* yaitu:⁵

1. Edukatif (pendidikan), yaitu sanksi *ta'zīr* yang memberikan dampak bagi terpidana untuk mengubah pola hidupnya untuk kearah yang lebih baik.
2. preventif (pencegahan), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terpidana. Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
3. Represif (membuat pelaku jera), adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi terpidana sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* dikemudian hari.

[illegible]

[illegible]

PENUTUP

Dari beberapa uraian dan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai order fiktif sebagai berikut:

- 76

Banyaknya pelaku order fiktif membuat perusahaan *grab* mengalami kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. *Grab* harus melakukan berbagai cara agar meminimalisir order fiktif. Seperti sering berkomunikasi terhadap *driver*, memperketat sistem *Grab*, menyesuaikan banyaknya *driver* dengan konsumen agar seimbang tidak terlalu banyak *driver* sehingga memicu order fiktif, dan juga memperkecil insentif.

Banyaknya pelaku order fiktif membuat perusahaan *grab* mengalami kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. *Grab* harus melakukan berbagai cara agar meminimalisir order fiktif. Seperti sering berkomunikasi terhadap *driver*, memperketat sistem *Grab*, menyesuaikan banyaknya *driver* dengan konsumen agar seimbang tidak terlalu banyak *driver* sehingga memicu order fiktif, dan juga memperkecil insentif.

Banyaknya pelaku order fiktif membuat perusahaan *grab* mengalami kerugian secara finansial maupun nama baik perusahaan. *Grab* harus melakukan berbagai cara agar meminimalisir order fiktif. Seperti sering berkomunikasi terhadap *driver*, memperketat sistem *Grab*, menyesuaikan banyaknya *driver* dengan konsumen agar seimbang tidak terlalu banyak *driver* sehingga memicu order fiktif, dan juga memperkecil insentif.

- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaruh Celah Hukumnya*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susilo. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Poletia, 1985.
- Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Kairo: Dar Al-Hadists, 2010, jilid 2.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT Bumi Aksara : Jakarta. 2008)
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Lamongan Nomor: 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg'
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).
- Akbar Abdul Ilham, *wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.
- Faizal Rachmad, *Wawancara*, Surabaya, 17 November 2018.
- Hidayat Aris, *wawancara*, 4 Mei 2019.
- Imannudin Achmad Irfam, *wawancara*, Surabaya, 30 April 2019.
- MW, *wawancara*, Surabaya, 30 April 2019.
- Pradhipta Anindya, *wawancara*, 2 Mei 2019.
- Grab, "GrabBike", <https://www.grab.com/id/bike/> diakses pada, 02 April 2019

